

**DAFTAR ISI**

HALAMAN SAMPUL DEPAN .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....	v
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vi
RINGKASAN.....	ix
SUMMARY .....	xii
ABSTRACT .....	xv
DAFTAR ISI .....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xxi
DAFTAR KONVENSI INTERNASIONAL .....	xxvi
DAFTAR PERATURAN NEGARA LAIN .....	xxvii
DAFTAR PUTUSAN/PENETAPAN PENGADILAN .....	xxviii
DAFTAR TABEL .....	xxxi
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Dan Rumusan Masalah .....	1
1.2. Tujuan Penelitian .....	18
1.3..Manfaat Penelitian .....	18
1.4. Orisinalitas Penelitian .....	19
1.5. Kerangka Teoritis .....	22
a. Prinsip Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak Sebagai Bagian Dari Prinsip Perlindungan Anak .....	22
b. Konsep Perlindungan Hukum Oleh Negara.....	26
c. Pengertian Anak .....	36
d. Konsep Perlindungan Anak Dan Kesejahteraan Anak .....	44
e. Pencatatan Perkawinan Dan Keabsahan Perkawinan .....	47
f. Kedudukan Hukum Anak: Anak Sah Dan Anak Luar Kawin .....	52
g. Konsep Hubungan Keperdataan Antara Orangtua Dan Anak .....	56
h. Pengakuan, Pengesahan dan Pengingkaran Anak .....	61
1.6. Metode Penelitian .....	70
1.6.1. Tipe Penelitian.....	70
1.6.2. Pendekatan Masalah .....	70
1.6.3. Sumber Bahan Hukum .....	74
1.6.4. Analisis Bahan Hukum .....	75
1.7..Sistematika Penulisan .....	77
<b>BAB II. FILOSOFI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK LUAR KAWIN.....</b>	<b>81</b>
2.1. Hakikat Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Kawin.....	81

2.1.1. Hak Anak Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia.....	81
2.1.2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak .....	91
2.1.3. <i>Ratio Legis</i> Pengaturan Tentang Perlindungan Anak.....	108
2.1.4. Asas-Asas Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia .....	111
2.2. Validasi Penormaam Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Kawin .....	130
2.2.1. Falsafah Negara Hukum Pancasila Sebagai Nilai Dasar Perlindungan Anak Luar Kawin .....	130
2.2.2. Landasan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Undang-Undang Dasar 1945 .....	144
2.3. Tujuan Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Kawin.....	147
2.3.1. Keadilan Sebagai Tujuan Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Kawin .....	147
2.3.2. Kepastian Hukum Sebagai Tujuan Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Kawin .....	164
2.3.3. Kemanfaatan Dalam Bentuk Kesejahteraan Anak Sebagai Tujuan Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Kawin.....	171
2.4. Aspek Ontologi, Epistemologi Dan Aksiologi Dalam Filosofi Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Kawin .....	176

**BAB III. PERKEMBANGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK  
LUAR KAWIN.....**

3.1. Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Kawin Dalam Hukum Nasional .....	186
3.2. Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Kawin Di Beberapa Negara .....	209
3.2.1 Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Kawin Di Belanda.....	211
3.2.1.1 Pengaturan Tentang Anak Luar Kawin Dalam Hukum Belanda.....	211
3.2.1.2 Persamaan Dan Perbedaan Antara Hukum Belanda Dan Indonesia Terkait Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Kawin.....	231
3.2.2 Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Kawin Di Malaysia .....	240
3.2.2.1 Pengaturan Tentang Anak Luar Kawin Dalam Hukum Malaysia .....	240
3.2.2.2 Persamaan Dan Perbedaan Antara Hukum Malaysia Dan Indonesia Terkait Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Kawin.....	263
3.3. Konsep <i>Ius Constituendum</i> Dalam Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Kawin Yang Memenuhi Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak .....	270

<b>BAB IV. PENDIRIAN PENGADILAN DALAM KASUS ANAK LUAR KAWIN DI INDONESIA .....</b>	<b>279</b>
4.1. Putusan Dan Penetapan Pengadilan Terkait Anak Luar Kawin Di Indonesia .....	279
4.1.1. Putusan Dan Penetapan Pengadilan Terkait Anak Luar Kawin Sebelum Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 .....	279
4.1.1.1 Putusan Pengadilan Negeri .....	279
a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 349/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Sel Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 519/Pdt.G/1996/PT.DKI Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 935 K/Pdt/1998.....	279
b. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 80/Pdt.G/1996/PN.Tng. Jo. putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 267/PDT/1997/PT.Bdg. Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3866 K/Pdt/1998 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 25 PK/Pdt/2001 .....	285
c. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 487/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Bar Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 155/Pdt.G/2007/PT.DKI Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2185 K/Pdt/2008....	293
4.1.1.2 Penetapan Pengadilan Negeri .....	302
a. Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 74/Pdt.P/2005/PN.TNG. ....	302
b. Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 123/Pdt.P/2006/PN.TNG. ....	307
c. Penetapan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 29/PDT.P/2011/PN.CLP.....	313
4.1.1.3 Putusan Pengadilan Agama... ..	320
a. Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 408/Pdt.G/2006/PA.Smn. ....	320
b. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0121/Pdt.G/2009/PA.JS.....	324
4.1.1.4 Penetapan Pengadilan Agama.....	332
a. Penetapan Pengadilan Agama Malang Nomor 415/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg. ....	332
b. Penetapan Pengadilan Agama Garut Nomor 58/Pdt .P/2011/PA.Grt.....	338
4.1.2. Putusan Dan Penetapan Pengadilan Terkait Anak Luar Kawin Sesudah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.....	344

4.1.2.1	Putusan Pengadilan Negeri.....	344
a.	Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 48/PDT.G/2013/PN.Kpj..	344
b.	Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 94/Pdt.G/2013/PN.LP.....	345
4.1.2.2	Penetapan Pengadilan Negeri.....	363
a.	Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 587/PDT.P/2013/PN.JKT.BAR..	363
b.	Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 443/Pdt .P/2013/PN.Ska. ....	367
c.	Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 80/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Brt.....	370
4.1.2.3	Putusan Pengadilan Agama.....	377
a.	Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 47/Pdt.P/2012/PA.Tgrs. Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 465 K/Ag/2012.....	377
b.	Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0564/Pdt.G/2012/PA. Yk.....	380
c.	Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1241/Pdt.G/2012/PA.JS. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 75/Pdt.G/2013/PTA.JKT Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 329 K/AG/2014 .....	384
4.1.2.4	Penetapan Pengadilan Agama.....	399
a.	Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0013/Pdt.P/2013/PA. JS.....	399
b.	Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0008/Pdt.P/2013/PA.Yk. ....	403
c.	Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0156/Pdt.P/2013/PA.JS.....	409
d.	Penetapan Pengadilan Agama Jombang Nomor 0177/Pdt.P/ 2014/PA.Jbg.....	418
e.	Penetapan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 0185/Pdt.P/2014/PA.TL. ....	423
f.	Penetapan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0023/Pdt.P/2015/PA.Btl. ....	433
g.	Penetapan Pengadilan Agama Blora Nomor 0056/Pdt.P/2015/PA.Bla.....	435
h.	Penetapan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0199/Pdt.P/2015/PA.Gs.....	438
i.	Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0157/Pdt.P/2016/PA JS.....	442

4.2. Analisis Terhadap <i>Ratio Decidendi</i> Putusan/Penetapan Pengadilan Terkait Anak Luar Kawin Di Indonesia .....	453
<b>BAB V. PENUTUP</b> .....	460
5.1 Simpulan .....	460
5.2. Saran .....	463

**DAFTAR BACAAN**

**DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

*Burgelijk Wetboek, Staatsblad* Nomor 23 Tahun 1847.

*Wetboek Van Strafrecht, Staatsblad* Nomor 732 Tahun 1915 jjs. *Staatsblad* Nomor 497, 645 Tahun 1917, diberlakukan, diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Tanggal 21 Nopember 1946.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk Di Seluruh Daerah Luar Jawa Dan Madura (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 1954, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 694).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 186 Tahun 2019 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143).

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400), sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611) dan Undang-undang

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2009 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078).

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4557).

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang

Hak-Hak Sipil Dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4558).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2006 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 2013 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720).

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4928).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2009 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 2019 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050).

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian



Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424).

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768).

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354).

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57).

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184).

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pedoman Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Dalam Rangka Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 739).

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2015 tentang Spesifikasi Blangko serta Formulasi Kalimat dalam Register Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Pengesahan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1134), yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2015 tentang Spesifikasi Blangko serta Formulasi Kalimat dalam Register Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Pengesahan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1542).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1764).

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1153).

**Peraturan Lainnya:**

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991).

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (SK Mendagri) Direktorat Jenderal Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) Nomor Dpt.7/539/7-77, tertanggal 13 Juli 1977.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya.

**DAFTAR KONVENSI INTERNASIONAL**

*The Universal Declaration Of Human Rights*, Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1948.

*International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights*, Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1966.

*International Covenant On Civil And Political Rights*, Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1966.

*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*, Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1979.

*Convention On The Rights Of The Child*, Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1989.

*The Hague Convention on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition, Enforcement and Co-operation in Respect of Parental Responsibility and Measures for the Protection of Children, Hague Conference on Private International Law*, 1996.

*The European Convention on The Exercise of Children's Rights*, Uni Eropa, 1996.

*The European Convention On Human Rights*, Uni Eropa, 1950, diperbarui terakhir kali pada tahun 2010.

**DAFTAR PERATURAN NEGARA LAIN**

**Belanda**

*Dutch Civil Code (Nieuw Burgelijk Wetboek), 1992.*

**Malaysia**

*Evidence Act 1950, Act 56, last amended and revised in 2006.*

*Registration Of Adoption Act 1952, Act 253, 1952, last amended and revised in 2006.*

*Adoption Act 1952, Act 257, last amended and revised in 2006.*

*Births And Deaths Registration Act 1957, Act 299, 1957, last amended and revised in 2018.*

*Legitimacy Act 1961, Act 60, 1961, last amended and revised in 1982.*

*Married Women And Children (Enforcement Of Maintenance Act 1968), Act 794, 1968, last amended and revised in 2017.*

*The Law Reform (Marriage and Divorce Act 1976, Act 164, last amended and revised in 2017.*

*Islamic Family Law (Federal Territories), Act 303, 1984.*

*Child Act 2001, Act 611, 2001.*

**DAFTAR PUTUSAN/PENETAPAN PENGADILAN**

**Daftar Putusan Pengadilan Negeri:**

Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 48/PDT.G/2013/PN .Kpj. tertanggal 3 September 2013.

Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 94/Pdt.G/2013/PN.LP. tertanggal 17 April 2014.

**Daftar Putusan Pengadilan Agama:**

Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 408/Pdt.G/2006/PA.Smn. tertanggal 27 Juli 2006.

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0121/Pdt.G/2009/PA.JS. tertanggal 14 September 2009.

Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0564/Pdt.G/2012/PA.Yk. tertanggal 20 Juni 2013.

**Daftar Penetapan Pengadilan Negeri:**

Penetapan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 29/PDT.P/2011/PN.CLP. tertanggal 18 April 2011.

Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 74/Pdt.P/2005/PN.TNG. tertanggal 26 Oktober 2005.

Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 123/Pdt.P/2006/PN.TNG. tertanggal 27 Agustus 2006.

Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 587/PDT.P/2013/PN.JKT.BAR. tertanggal 14 Mei 2013.

Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 443/Pdt .P/2013/PN.Ska. tanggal 7 November 2013.

Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 80/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Brt.. tertanggal 28 Februari 2018.

**Daftar Penetapan Pengadilan Agama:**

- Penetapan Pengadilan Agama Malang Nomor 415/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg. tertanggal 17 Januari 2011.
- Penetapan Pengadilan Agama Garut Nomor 58/Pdt .P/2011/PA.Grt. tertanggal 12 Mei 2011.
- Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0013/Pdt.P/2013/PA. JS. tertanggal 5 Maret 2013.
- Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0008/Pdt.P/2013/PA.Yk. tertanggal 7 Maret 2013.
- Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0156/Pdt.P/2013/PA.JS. tertanggal 8 Oktober 2013.
- Penetapan Pengadilan Agama Jombang Nomor 0177/Pdt.P/ 2014/PA.Jbg. tertanggal 18 Agustus 2014.
- Penetapan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 0185/Pdt.P/2014/PA.TL. tertanggal 29 September 2014.
- Penetapan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0023/Pdt.P/2015/PA.Btl. tertanggal 26 Februari 2015.
- Penetapan Pengadilan Agama Blora Nomor 0056/Pdt.P/2015/PA.Bla. tertanggal 11 Agustus 2015.
- Penetapan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0199/Pdt.P/2015/PA.Gs. tertanggal 14 Januari 2016.
- Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0157/Pdt.P/2016/PA JS. tertanggal 16 Mei 2016.

**Daftar Putusan Mahkamah Agung:**

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 935 K/Pdt/1998 tertanggal 21 Desember 1999.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 25 PK/Pdt/2001 tertanggal 6 Oktober 2005.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 2185 K/Pdt/2008. tertanggal 10 Maret 2009.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 465 K/Ag/2012 tertanggal 18 Desember 2012.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 329 K/Ag/2014 tertanggal 22 Juli 2014.

**Daftar Putusan Mahkamah Konstitusi:**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Uji Materiil Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tertanggal 17 Februari 2012.

**Daftar Putusan Negara Lain**

*Kroon and Others v. The Netherlands (application no. 18535/91), European Court of Human Rights, 1994.*

*Haas v The Netherlands (application no. 36983/71), European Court of Human Rights, 2004.*

*Ng Chian Perng v. Ng Ho Peng (2 MLJ 686 HC), High Court of Malaysia, 1998.*

*Lim Hooi Teik v Lee Lai Cheng (on behalf of LeeChee Zeng and herself), (civil appeal no. P-02-134-01/2013), The Court of Appeal Malaysia, 2017.*

*A Child v National Registration Department (civil appeal no. W-01(a)-365-09/2016), The Court of Appeal Malaysia, 2017.*

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.5.C. : Batas Usia Anak / Belum Dewasa Menurut Berbagai Peraturan Perundang-undangan .....	41
Tabel 3.2.1.2. : Persamaan Dan Perbedaan Antara Hukum Indonesia Dan Belanda Terkait Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Kawin..	238
Tabel 3.2.2.2. : Persamaan Dan Perbedaan Antara Hukum Indonesia Dan Malaysia Terkait Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Kawin..	267
Tabel 4.1.1.1. : Daftar Putusan Pengadilan Negeri Terkait Anak Luar Kawin Sebelum Keluarnya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 ...	299
Tabel 4.1.1.2. : Daftar Penetapan Pengadilan Negeri Terkait Anak Luar Kawin Sebelum Keluarnya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 ...	317
Tabel 4.1.1.3. : Daftar Putusan Pengadilan Agama Terkait Anak Luar Kawin Sebelum Keluarnya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 ...	331
Tabel 4.1.1.4. : Daftar Penetapan Pengadilan Agama Terkait Anak Luar Kawin Sebelum Keluarnya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 ...	342
Tabel 4.1.2.1. : Daftar Putusan Pengadilan Negeri Terkait Anak Luar Kawin Sesudah Keluarnya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 ....	362
Tabel 4.1.2.2. : Daftar Penetapan Pengadilan Negeri Terkait Anak Luar Kawin Sesudah Keluarnya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 ....	375
Tabel 4.1.2.3. : Daftar Putusan Pengadilan Agama Terkait Anak Luar Kawin Sesudah Keluarnya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 ....	396
Tabel 4.1.2.4. : Daftar Penetapan Pengadilan Agama Terkait Anak Luar Kawin Sesudah Keluarnya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 ....	445